



BAB 4

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS



4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJM, atau RPJP). Adanya kesenjangan ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Kotabaru, perlu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.



Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal melalui analisa SWOT, yang merupakan instrument untuk mengidentifikasi dan menganalisis beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan isu-isu strategis di dalam mengelola penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Kotabaru. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Jadi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Tabel 4.1. Tantangan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

No	Tantangan/ Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Keterbatasan infrastruktur (Jalan, listrik dan air)	Optimalisasi 4 Sumber Dana Pembangunan yaitu APBD 1. APBD 2, APBN dan CD/CSR, Investasi Swasta dan partisipasi masyarakat, Kotabaru masuk di jalur pelayaran nasional dan internasional pada alur laut kepulauan Indonesia-II (ALKI-2) Kotabaru masuk dalam Koridor 3 (Kalimantan)–MP3EI, Pembangunan Tol Laut menyesuaikan dengan prinsip Nawacita	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber air baku kondisi debit air umumnya rendah saat musim kemarau. b. Pengelolaan sumber air baku oleh masyarakat sekitar cenderung menyebabkan pemborosan karena menggunakan teknologi yang terbatas c. Topografi wilayah Kabupaten Kotabaru yang terpisah pulau-pulau memerlukan investasi yang tinggi d. Proporsi Jalan yang rusak lebih tinggi dibanding jalan yang baik merupakan salah satu faktor lambatnya pertumbuhan ekonomi Kotabaru e. Ketergantungan penyediaan listrik kepada BBM yang



No	Tantangan/ Kelemahan	Peluang	Ancaman
			jumlahnya makin berkurang dan biaya pengelolaan listrik mahal
2	Kualitas SDM, IPM, Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	<p>a. Pengalokasian program dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat sesuai daerah pengembangan dan usulan masyarakat/kelompok tani (Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Peternakan, dll)</p> <p>b. Bantuan Sosial Masyarakat miskin (Beras, jamkesda/jamkesmas)</p> <p>c. Pelatihan ketrampilan masyarakat di Balai Latihan Kerja ,ataupun kegiatan kewirausahaan di PKBM, pelatihan dan pemberian modal usaha dari Perindakop dan</p> <p>d. Seiring dengan berkembangnya berbagai hasil informasi dan teknologi yang menambah wawasan dan komitmen bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan spiritual.</p>	<p>a. Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru menunjukkan gambaran beban yang semakin berat dalam menghadapi persaingan pasar bebas.</p> <p>b. Disparitas status kesehatan antar wilayah di Kotabaru masih rendah.</p> <p>c. Migrasi masuk akan bertambah deras dengan keterampilan keahlian yang lebih baik dari penduduk lokal</p> <p>d. Penyediaan lapangan kerja untuk klasifikasi pendidikan relatif tinggi, sehingga masih perlu ditingkatkan mengingat untuk kategori salah satu penyebab tingkat pengangguran relatif masih tinggi.</p> <p>e. Penyediaan ketrampilan di BLK belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja</p>
3	Program /kegiatan tingkat capaiannya masih belum tercapai sesuai keinginan	Kebijakan dan Komitmen Kepala Daerah agar Perangkat Daerah Fokus pada penyelesaian Visi Misi,	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan Perangkat Daerah tidak fokus pada penyelesaian Visi Misi
4	Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Luas Total Hutan lindung, produksi dan Konversi, yang telah mempunyai Tata Ruang, Program kegiatan dari Dinas Kehutanan untuk melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program BLHD untuk melakukan penanaman, adanya program RTH dari Cipta Karya, Adanya Masterplan Penanggulangan Bencana, Adanya PD yang menangani, dan adanya	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi iklim yang kadang sulit diprediksi, merupakan ancaman tersendiri bagi pengembangan usaha di bidang pertanian • Kecenderungan memanfaatkan sumberdaya alam tidak terkecuali hutan semaksimal mungkin dengan alasan untuk memperoleh PAD yang tinggi dapat mengganggu pembangunan yang



No	Tantangan/ Kelemahan	Peluang	Ancaman
		program pasca bencana	berkelanjutan.
5	Era keterbukaan berdampak pada budaya dan gaya hidup dan Migrasi masuk dengan tingkat keterampilan dan keahlian yang lebih baik jika dibanding dengan penduduk lokal.	Interaksi yang lebih intens baik regional maupun internasional membuka peluang terhadap akses ke sumber-sumber baru dan hasil informasi dan teknologi yang menambah wawasan dan komitmen bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan spiritual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kehidupan sosial masyarakat Kotabaru akan menghadapi era keterbukaan yang lebih luas, dengan berbagai dampak seperti budaya dan gaya hidup yang tidak cocok dengan akar budaya masyarakat yang kontraproduktif terhadap kualitas SDM.
6	<p>Pertanian</p> <p>a. Produksi padi meningkat namun penambahan produksi masih di bawah peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, sementara itu ketersediaan lahan untuk pertanian masih luas</p> <p>b. Globalisasi mengakibatkan semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan.</p> <p>c. Iklim yang sulit diprediksi, berpengaruh bagi pengembangan usaha di bidang pertanian.</p> <p>d. Penyakit ternak makin berkembang variasinya dan makin tak</p>	<p>a. Era otonomi menciptakan kesempatan masyarakat untuk secara mandiri mengelola perekonomiannya secara profesional untuk kepentingan masyarakat</p> <p>b. Globalisasi dan keterbukaan menjanjikan peluang bagi akses kepada sumber-sumber input baik kapital, teknologi dan skill secara bebas dan murah, disamping itu akan membuka peluang pemasaran lebih luas bagi produk dan komoditas.</p> <p>c. Melalui desentralisasi semakin besar peluang sektor swasta untuk berperan dalam pembangunan pertanian di perdesaan. terkait industri hulu sampai hilir.</p> <p>d. Globalisasi dan perdagangan bebas telah membuka peluang bagi usaha bidang pertanian/agribisnis dalam kemitraan maupun kesempatan pemasaran dan pembelian.</p> <p>e. Meningkatnya permintaan terhadap produk-produk pertanian, perkebunan dan</p>	<p>a. Walaupun produksi padi selalu meningkat namun penambahan produksi tersebut masih di bawah peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. kesalahan dalam pengkonversian hasil panen akan berpengaruh pada ketersediaan pangan.</p> <p>b. Globalisasi mengakibatkan semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan serta meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar dan semakin berperannya selera konsumen dalam menentukan aktivitas di sektor ini.</p> <p>c. Kondisi iklim yang kadang sulit diprediksi, merupakan ancaman tersendiri bagi pengembangan usaha di bidang pertanian.</p> <p>d. Penyakit ternak yang makin berkembang variasinya dan makin tak terbatas penyebarannya diprediksi menjadi ancaman yang nyata bagi usaha peternakan.</p>



No	Tantangan/ Kelemahan	Peluang	Ancaman
	<p>terbatas penyebarannya</p> <p>e. Meningkatnya konsumsi masyarakat akan protein hewani, merupakan tantangan yang harus dihadapi bidang peternakan terlebih lagi dengan terus meningkatnya jumlah penduduk.</p>	<p>peternakan merupakan peluang pasar yang sangat besar.</p> <p>f. Pencanaan Program Revitalisasi Sub Sektor Perkebunan melalui pengembangan komoditas kelapa sawit, karet, kakao dan jarak oleh Pemerintah Pusat merupakan peluang besar yang dapat diraih Kabupaten Kotabaru untuk semakin memacu pengembangan komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet.</p> <p>g. Berkembangnya teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan bagi pengembangan peternakan yang lebih produktif.</p> <p>h. Tersedianya potensi sumberdaya lahan dan angkatan kerja yang belum termanfaatkan diluar peternakan menciptakan peluang agribisnis yang besar di masa depan.</p> <p>i. Meningkatnya permintaan terhadap produk pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan peluang pasar yang sangat besar.</p> <p>j. Pencanaan Program Revitalisasi Sub Sektor Perkebunan melalui pengembangan komoditas kelapa sawit, karet, kakao dan jarak oleh Pemerintah Pusat merupakan peluang besar yang dapat diraih Kabupaten Kotabaru untuk semakin memacu pengembangan komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet.</p>	



No	Tantangan/ Kelemahan	Peluang	Ancaman
7	<p>Perikanan dan Kelautan</p> <p>a. Pemanfaatan wilayah daratan, pesisir dan laut oleh banyak sektor makin meningkat</p> <p>b. Kekeliruan pemahaman akan otonomi daerah atas hak pengelolaan wilayah laut kearah pengaplingan laut menjurus pada konflik perebutan sumberdaya ikan dalam satuan wilayah penangkapan.</p> <p>c. Laut yang menjadi wilayah pengelolaan Kabupaten Kotabaru sebagai barometer penangkapan ikan di Kalimantan Selatan dianggap sudah mengarah pada tingkat kejenuhan dan penuh sesak dengan kapal-kapal penangkap ikan.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan mandat otonomi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan (eksplorasi, eksplotasi dan konservasi) sumber daya wilayah laut, Terbentuknya Departemen Kelautan Dan Perikanan RI (2001) dan kelembagaan perikanan di daerah sesuai dengan otonomi daerah (UU Nomor 32/2004) akan menciptakan program perikanan yang bersinergis antara pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Adanya trend perikanan dunia (permintaan pasar dan peningkatan produksi), trend gaya hidup abad 21 (<i>older generation, people on the run, food to become more international</i>), dan beralihnya konsumsi daging hewan darat ke daging ikan.</p> <p>c. Kotabaru mempunyai kedalaman laut yang sangat cocok untuk dioperasikannya pelabuhan samudra sehingga akses keluar terutama pulau Jawa dan pulau Sulawesi lebih mudah</p>	<p>a. Nelayan luar yang masuk ke wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kotabaru dalam musim tertentu setiap tahun umumnya menggunakan armada modern akan menimbulkan kerugian bagi daerah dan nelayan Kabupaten Kotabaru.</p> <p>b. Kekeliruan pemahaman otonomi daerah atas hak pengelolaan wilayah laut kearah pengaplingan laut atau seakan daerah berdaulat atas laut menjurus pada konflik perebutan sumberdaya ikan dalam satuan wilayah penangkapan.</p> <p>c. Laut yang menjadi wilayah pengelolaan Kabupaten Kotabaru sebagai barometer penangkapan ikan di Kalimantan Selatan dianggap sudah mengarah pada tingkat kejenuhan dan penuh dengan kapal-kapal penangkap ikan.</p>



No	Tantangan/ Kelemahan	Peluang	Ancaman
8	<p>Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>a. Keunggulan skill, teknologi, dan kualitas produk yang dimiliki pihak luar lebih baik jika dibanding dengan lokal, kelangkaan energi dan sumber daya air.</p> <p>b. Semakin terbukanya lalu lintas perdagangan sebagai konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi.</p> <p>c. Kekurang mampuan sektor industri memenuhi tuntutan konsumen.</p> <p>d. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen lainnya.</p>	<p>a. Munculnya teknologi baru dibidang informasi dan komunikasi yang akan sangat menunjang kemampuan untuk akses pasar secara cepat dan terbuka.</p> <p>b. Peluang pasar di kawasan regional Kalimantan dan akses pasar ke luar pulau Kalimantan (Jawa/Bali dan Sulawesi) sangat terbuka, terlebih lagi dengan terbuka luasnya peluang pasar ekspor.</p> <p>c. Tidak gampang ditembusnya pasar domestik oleh produk-produk sejenis dari impor (<i>barriers to entry</i> secara alamiah cukup kuat) karena tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan rendah (teknologi sederhana sampai madya) dan tidak memerlukan ketrampilan yang tinggi.</p>	<p>a. Keunggulan skill, teknologi, dan kualitas produk yang dimiliki pihak luar dapat memasuki dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan produksi di daerah.</p> <p>b. Persaingan dari produk-produk industri yang berasal dari impor akan semakin tajam sebagai akibat dari semakin terbukanya lalu lintas perdagangan sebagai konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi.</p> <p>c. Kekurangmampuan sektor industri memenuhi tuntutan konsumen akan mutu produk yang semakin tinggi dibandingkan dengan mutu produk sejenis dari buatan daerah lain atau luar negeri.</p> <p>d. Ketergantungan terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen lainnya.</p>
9	<p>Sumberdaya Alam</p> <p>a. Adanya gangguan supply energi</p>	<p>a. Potensi SDA berupa hutan, kebun, tambang dan kelautan merupakan kekayaan yang berlimpah baik yang dapat</p>	<p>a. Ancaman kelangkaan energi dan sumber daya air di dunia mengharuskan Kotabaru secara ekonomis mampu mengelola sumber-</p>



No	Tantangan/ Kelemahan	Peluang	Ancaman
	<p>(misalnya, listrik dan BBM) dan air baku.</p> <p>b. Pemanfaatan SDA cenderung merusak lingkungan hidup.</p> <p>c. Praktik <i>illegal mining, logging</i> dan <i>fishing</i> masih tinggi.</p>	<p>diperbaharui maupun yang tidak bisa diperbaharui.</p> <p>b. Kondisi potensi yang sangat besar tersebut dapat mengundang investor untuk berinvestasi di daerah ini.</p> <p>c. Kerjasama regional maupun internasional, sangat mudah dibangun karena potensi Sumber Daya Alam daerah sangat diperlukan oleh daerah lain.</p> <p>d. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi <i>illegal mining, illegal logging</i> dan <i>illegal fishing</i> semakin memperbesar pencapaian kelestarian lingkungan.</p>	<p>sumber dayanya secara efisien dan mencari berbagai alternatif.</p> <p>b. Pemanfaatan SDA cenderung merusak lingkungan hidup.</p> <p>c. Tingginya permintaan SDA mengakibatkan rangsangan terhadap terjadinya <i>illegal mining, illegal logging</i> dan <i>illegal fishing</i>.</p> <p>d. Praktik <i>illegal mining, logging</i>, dan <i>fishing</i> masih tinggi dan mendapat dukungan dari pihak tertentu.</p>
10	<p>Sosial, Budaya dan Agama</p> <p>a. Informasi dari luar membawa serta budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia.</p> <p>b. Masyarakat di pelosok yang kurang informasi dan kurang mendapat pendekatan secara intensif sehingga rawan terhadap hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>c. Euforia kebebasan era reformasi sering</p>	<p>a. Berkembangnya teknologi informasi semakin menambah informasi dari luar yang bisa menambah wawasan masyarakat tentang interrelasi masyarakat secara sosial budaya dan agama.</p> <p>b. Meningkatnya arus migrasi dari luar Kotabaru yang berbeda etnis (seperti Jawa dan Sumatera) menambah kemungkinan untuk melakukan pembauran secara nasional.</p>	<p>a. Derasnya arus informasi dari luar membawa serta budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat yang luhur karenanya dapat melunturkan budaya kebersamaan dan gotong royong, rasa hormat pada orang lain, keimanan dan ketaqwaan, bahkan sebaliknya bisa menumbuhkan individualisme, hedonisme dan pragmatisme, serta kemalasan dan sikap serba ingin <i>instant</i>.</p> <p>b. Masih terdapatnya masyarakat pedalaman yang kurang informasi dan kurang mendapat pendekatan secara intensif sehingga rawan terhadap hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih jika kesenjangan ekonomi</p>



No	Tantangan/ Kelemahan	Peluang	Ancaman
	membawa kecenderungan pemanfaatan kedudukan & sarana politik secara berlebihan.		<p>semakin melebar sementara kehidupan mereka tidak diberdayakan dengan sungguh-sungguh.</p> <p>c. Euforia kebebasan era reformasi sering membawa kecenderungan pemanfaatan kedudukan & sarana politik secara berlebihan.</p> <p>d. Akibatnya timbul berbagai konflik yang tidak esensial namun tidak berkesudahan yang didasari atas kepentingan pribadi semata, kebebasan berpendapat yang tidak terarah dan tidak bertanggung jawab, serta merebaknya perilaku amoral dan asusila.</p>

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kabupaten Kotabaru, isu dunia internasional serta penelaahan kebijakan pembangunan, nasional dan daerah lain di sekitar Kabupaten Kotabaru. Isu strategis merupakan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kotabaru selama 5 tahun ke depan.

4.2.1. Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

Perumusan isu strategis Kabupaten Kotabaru dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional agar tercipta suatu keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat



dipertanggungjawabkan. Dalam mengidentifikasi isu-isu strategis bukan hanya mempertimbangkan isu strategis daerah lain tapi juga kesesuaian atau sinkronisasi dengan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan. Identifikasi Isu-isu strategis dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis		
	Dunia Internasional SDGs	Kebijakan Nasional (NAWACITA)	Provinsi Kalimantan Selatan
1	Mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Keamanan, Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan
2	Mencapai pendidikan dasar untuk semua	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	Pembangunan Manusia dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan		Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
4	Menurunkan angka kematian bayi serta status nutrisi		Menurunkan angka kematian bayi
5	Menurunkan angka kematian ibu akibat melahirkan		Menurunkan angka kematian ibu melahirkan
6	Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.		
7	Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketersediaan energi serta perubahan iklim		Degradasi kuantitas dan kualitas Sumberdaya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup
8	Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya



No	Isu Strategis		
	Dunia Internasional SDGs	Kebijakan Nasional (NAWACITA)	Provinsi Kalimantan Selatan
		Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	Meningkatkan kualitas demokrasi dan peran pemerintah daerah
		Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
		Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Peningkatan Daya saing Perekonomian Daerah
		Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Industri kreatif sebagai sektor strategis peningkatan ekonomi
		Melakukan revolusi karakter bangsa	Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial
		Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia	

4.2.2. Penelaahan Isu-isu Strategis Daerah Lain

Dalam menentukan isu-isu strategis di Kabupaten Kotabaru perlu diperhatikan pula isu-isu strategis daerah lain. Penelaahan program yang menjadi kewenangan bersama dengan daerah lain karena diperlukan adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan dan adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan dan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan



kewenangan bersama (khususnya pada daerah-daerah yang letaknya di daerah perbatasan dua wilayah), untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3. Identifikasi Program Daerah lain

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait
1	Kabupaten Tanah Laut	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing dan menciptakan iklim investasi yang menarik
		Pembangunan kesehatan masyarakat dan peningkatan gaya hidup sehat
		Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal
		Peningkatan kualitas tenaga kerja yang lebih professional dan kredibel
		Mengarahkan kebijakan pasar kerja untuk mendorong terciptanya lapangan kerja
		Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak
		Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang
		Pembangunan sektor pertanian (pengembangan agroindustri dan agribisnis) dan peternakan
		Pengembangan UMKM dan pemberdayaan koperasi
		Pengembangan kepariwisataan
		Pembangunan kehutanan serta perlindungan dan konservasi SDA dan Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
2	Kabupaten Tanah Bumbu	Ketahanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
		Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
		Pemberantasan Buta Aksara
		Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
		Peningkatan kualitas kesehatan dan penanganan penyakit
		Pemberdayaan Masyarakat
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian
		Pembangunan birokrasi yang professional serta efektivitas pengawasan aparat
		Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan
		Pembangunan bidang komunikasi dan informasi
		Fasilitasi Akses Informasi dan Akses Sumber Faktor Produksi Usaha Masyarakat
		Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan industri rumah tangga
		Fasilitasi pemasaran hasil industri kecil menengah dan industri rumah tangga



No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait
3	Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur	Mengoptimalkan keunggulan daerah Kabupaten Paser di sektor pertanian melalui peningkatan produksi dan produktivitas serta pengembangan lembaga pendukung pra dan pasca panen
		Mengembangkan industri besar dan menengah berbasis pertanian dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kebocoran wilayah melalui peningkatan nilai tambah
		Mengembangkan usaha kecil dan mikro serta koperasi di wilayah perdesaan dalam rangka Pengentasan kemiskinan, peningkatan Pendapatan masyarakat dan mengatasi kesenjangan wilayah
		Mengembangkan perekonomian daerah diluar pertanian, perikanan dan kelautan, serta industri dan KUMKM
		Mensinergikan fasilitasi pemerintah, komitmen swasta, dan kekuatan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kelembagaan dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
		Memperluas dan pemeratakan kesempatan warga masyarakat memperoleh pendidikan.
		Mengembangkan sistem perlindungan sosial
		Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.
		Mengalokasikan SDM yang efisien dan meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan yang optimum pada masyarakat serta meningkatkan kemampuan teknis aparatur pelayanan publik.
		Menyusun system perencanaan pembangunan yang didukung dengan data yang akurat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
4	Provinsi Sulawesi Barat	Pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan
		Perikanan dan kelautan
		Ekonomi dan pembangunan
		Kesehatan
		Pendidikan dan Sosial Budaya
		Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
		Pemerintahan, hukum, politik, dan keamanan
		Perencanaan pembangunan



4.2.3. Isu-isu Strategis Kabupaten Kotabaru

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Kotabaru serta isu-isu strategis jangka panjang internasional, nasional serta regional dan aspek lainnya maka isu strategis pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.
2. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan.
3. Peningkatan dan Pemerataan Kesehatan.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan.
5. Peningkatan Pelayanan Publik.
6. Peningkatan Profesionalisme Aparatur.
7. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
8. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah.
9. Pengembangan Ekonomi Potensial Kabupaten Kotabaru dan UMKM.
10. Peningkatan Infrastruktur Dasar Masyarakat.

Tabel 4.4. Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Kotabaru

No	Isu Strategis			
	Dunia Internasional (MDGs)/ SDGs	Kebijakan Nasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Kotabaru
1	Mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Keamanan, Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2	Mencapai pendidikan dasar untuk semua	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	Pembangunan Manusia dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan
3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan		Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Peningkatan Pelayanan Publik
4	Menurunkan angka kematian bayi serta status nutrisi		Menurunkan angka kematian bayi	Peningkatan dan Pemerataan Kesehatan
5	Menurunkan angka kematian ibu akibat melahirkan		Menurunkan angka kematian ibu melahirkan	Peningkatan dan Pemerataan Kesehatan
6	Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.			Peningkatan dan Pemerataan Kesehatan
7	Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketersediaan energy serta perubahan iklim		Degradasi kuantitas dan kualitas Sumberdaya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan
8	Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Peningkatan Pelayanan Publik
9		Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	Meningkatkan kualitas demokrasi dan peran pemerintah daerah	Peningkatan Infrastruktur Dasar Masyarakat Peningkatan Profesionalisme Aparatur
10		Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

No	Isu Strategis			
	Dunia Internasional (MDGs)/ SDGs	Kebijakan Nasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Kotabaru
11		Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Peningkatan Daya saing Perekonomian Daerah	Peningkatan Daya saing Perekonomian Daerah
12		Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Industri kreatif sebagai sektor strategis peningkatan ekonomi	Pengembangan Ekonomi Potensial Kabupaten Kotabaru dan UMKM
13		Melakukan revolusi karakter bangsa	Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosiai	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan Peningkatan Pelayanan Publik serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur
14		Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia		